

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 – 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) Tahun 2024 – 2026.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan perangkat daerah yang menjadi panduan bagi Pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pembangunan di masa transisi.

Rancangan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra akan menjadi dasar dalam hal penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja DPMPTSP Prov. Sultra yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DPMPTSP Prov. Sultra untuk tahun selanjutnya.

Dokumen Rancangan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah harus diwujudkan selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun kedepan dengan memperhatikan kemampuan finansial perangkat daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Rancangan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 menjadi dokumen daerah yang perlu diketahui dan dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder DPMPTSP) dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah perangkat daerah.

Sebagai komitmen Bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Rancangan Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kendari, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
 BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	 18
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	18
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	50
 BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah ...	 53
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	53
3.2 Isu Strategis.	55
 BAB IV Tujuan dan Sasaran	 57
 BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	 73

BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan		75
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan		132
	7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)		132
	7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)		133
BAB VIII	Penutup		136
	A. Kesimpulan		136
	B. Saran		137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	6
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara	23
Gambar 2.2	Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Gambar 2.3	Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Gambar 2.4	Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Berdasarkan Golongan	26
Gambar 2.5	Perkembangan Aset DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2022	27
Gambar 2.6	Perkembangan Target & Realisasi Investasi Sultra Tahun 2018-2022	28
Gambar 2.7	Realisasi Investasi Sultra Tahun 2018-2022	29
Gambar 2.8	Gambaran Target Realisasi Investasi Sultra Tahun 2018-2022	29
Gambar 2.9	10 Besar Realisasi Investasi Sultra Tahun 2022 Berdasarkan Sektor	30
Gambar 2.10	Proyek Kawasan Industri di Sultra	31
Gambar 2.11	Jumlah Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2018-2020	33
Gambar 2.12	Dokumentasi Rapat Ekspose Rencana Kerja 2023 dan Kinerja 2022 DPMPTSP se-Sultra Hotel Kubah 9 Kendari, 24 Februari 2023	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI	34
Tabel 2.2	Perizinan Berusaha Non KBLI	35
Tabel 2.3	Perizinan Non Berusaha Non KBLI	36
Tabel 2.4	Non Perizinan yang Merupakan Kewenangan DPMPTSP	37
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023-2024	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026	60
Tabel 4.2	<i>Cascading</i> Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2024-2026	74
Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026	82
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026	133
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Renstra DPMPTSP Prov. Sultra) Tahun 2024 sampai Tahun 2026, dipandang perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian diantaranya:

- a. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi khususnya terkait perencanaan dan penganggaran
- b. Perubahan gambaran kondisi ekonomi daerah khususnya terkait sektor investasi
- c. Penyesuaian prioritas daerah
- d. Penyesuaian sasaran daerah
- e. Perubahan lokasi
- f. Penambahan atau pengurangan target kinerja
- g. Penyesuaian pagu indikatif
- h. Perubahan regulasi
- i. Adanya bencana non alam Covid-19

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan secara tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menjadi sangat penting karena pada dasarnya sumberdaya yang dimiliki oleh

daerah/OPD relatif terbatas, sedangkan kebutuhan relatif tidak terbatas. Oleh karena itu Perencanaan yang baik sangat memungkinkan sumberdaya pembangunan daerah yang terbatas dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud dalam dokumen ini adalah meliputi tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- e. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

- Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra OPD;
- b. Penyusunan rancangan Renstra OPD;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan
- d. Penetapan Renstra OPD.

Dalam aplikasinya Renstra OPD dirumuskan dengan cara:

- a. Transparan;

Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- b. Responsif;

Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

- c. Efisien

Efisien merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal

- d. Efektif;

Efektif mengandung makna kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel;

Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Partisipatif;

Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

g. Terukur;

Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

h. Berkeadilan; dan

Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

i. Berwawasan lingkungan.

Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Renstra menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

a. Teknokratis;

Pendekatan teknokratis artinya menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

b. Partisipatif;

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

c. Politis; dan

Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye.

d. *Top-down* dan *bottom-up*

Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan atas ke bawah (*top-down*) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Disamping itu Renstra ini merupakan sistem perencanaan yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Renstra ini merupakan penjabaran dan implementasi RPJMD Prioritas Sulawesi Tenggara 2022 – 2026. Hubungan antara Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya disajikan melalui gambar berikut:

The diagram illustrates the hierarchy of spatial planning instruments in Indonesia, organized into two main levels: **Pemerintah Pusat** (Central Government) and **Pemerintah Daerah** (Regional Government).

Central Government (Pemerintah Pusat):

- RPJP Nasional** (National Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM Nasional** (National Long-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- RPJM Nasional** leads to **RKP** (Regional Development Plan) via *Dijabarkan* (Detailed).
- RKP** leads to **RAPBN** (Regional Annual Budget) via *Pedoman* (Guideline).
- RAPBN** leads to **APBN** (National Annual Budget) via *Pedoman* (Guideline).
- RPJM Nasional** also leads to **Renstra SKPD** (Regional Medium-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- Renstra SKPD** leads to **Renja SKPD** (Regional Short-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- Renja SKPD** leads to **RKA SKPD** (Regional Annual Budget) via *Pedoman* (Guideline).
- RKA SKPD** leads to **Rincian APBD** (Regional Annual Budget Detail) via *Pedoman* (Guideline).

Regional Government (Pemerintah Daerah):

- RPJP Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM Daerah** (Regional Long-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- RPJM Daerah** leads to **RKP Daerah** (Regional Development Plan) via *Dijabarkan* (Detailed).
- RKP Daerah** leads to **RAPBD** (Regional Annual Budget) via *Pedoman* (Guideline).
- RAPBD** leads to **APBD** (Regional Annual Budget) via *Pedoman* (Guideline).
- RPJM Daerah** also leads to **Renstra SKPD** (Regional Medium-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- Renstra SKPD** leads to **Renja SKPD** (Regional Short-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- Renja SKPD** leads to **RKA SKPD** (Regional Annual Budget) via *Pedoman* (Guideline).
- RKA SKPD** leads to **Rincian APBD** (Regional Annual Budget Detail) via *Pedoman* (Guideline).

Legal Basis:

- UU No. 25 Thn 2005 SPPN** (Law No. 25 of 2005 on Spatial Planning) governs the national and regional development plans (RPJP, RPJM, RKP, Renstra, Renja).
- UU No. 17 Thn 2003 KN** (Law No. 17 of 2003 on Regional Government) governs the regional annual budgets (RAPBN, RAPBD, RKA SKPD, APBD, Rincian APBD).

a. Renstra DPMPSTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

RENSTRA DPMPTSP PROV. SULTRA 2024-2026

Pembangunan Nasional pada pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya adalah mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan nasional dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Begitu pula dalam Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2022 dijelaskan bahwa dalam penyusunan Renstra OPD Provinsi memperhatikan penyelarasan target, indikator dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

- b. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan selama periode Penjabat Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025, terutama yang berkaitan erat pada kesesuaian sasaran

pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap ketiga dan keempat RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Prov. Sultra

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 senantiasa mengedepankan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan daerah provinsi di regional sulawesi dengan memperhatikan aspek prioritas bersama, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat serta kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk DPMPTSP Prov. Sultra.

d. Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026

RPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

e. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 dengan Renja DPMPTSP Prov. Sultra

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Renja DPMPTSP Prov. Sultra sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Renja memuat rancangan prioritas pembangunan DPMPTSP Prov. Sultra, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- f. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2034

Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 sejalan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 untuk lebih fokus pada pembangunan kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan SDA.

- g. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Dokumen Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 selain berkorelasi dengan dokumen perencanaan strategi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) selaku kementerian yang membidangi sektor penanaman modal.

- h. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota Se-Sultra

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan OPD provinsi harus selaras dengan dokumen perencanaan OPD Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104 tambahan lembaran Negara RI No. 4421).
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 4438).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 257, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); yang disempurnakan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4189/Keuda tanggal 12 Oktober 2020; serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/5889/Keuda tanggal 27 Desember 2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan kerangka strategis pelaksanaan program serta kegiatan bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai upaya mewujudkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Prov. Sultra. Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah:

1. Sebagai pedoman kerangka acuan dalam mewujudkan visi, misi, dan program jangka pendek dan menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Sebagai instrumen bagi Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara didalam mendayagunakan dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan proporsional dalam upaya mencapai tujuan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Sebagai instrumen pengukuran pencapaian kinerja semua program jangka pendek dan menengah DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP Prov. Sultra, fungsi Renstra DPMPTSP Prov. Sultra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra, keterkaitan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI dan Renstra Revisi DPMPTSP Prov. Sultra/Kabupaten/Kota se-Sultra serta dengan Renja DPMPTSP Prov. Sultra. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yakni: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP Prov. Sultra dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Prov. Sultra dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP Prov. Sultra yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, kelompok sasaran layanan, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Revisi DPMPTSP Prov. Sultra ini.

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah terbagi dalam beberapa sub bab yaitu:

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Penentuan isu-isu strategis

Pada bagian ini di-review kembali faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Investasi/BKPM.
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Revisi DPMPTSP Prov. Sultra serta Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Sultra.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Peran DPMPTSP Prov. Sultra
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Revisi DPMPTSP Prov. Sultra tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran perangkat jangka menengah perangkat daerah. Penentuan tujuan Renstra Perangkat Daerah Prov. Sultra memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD).

BAB VI. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024-2026.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan dari dokumen Renstra Revisi DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 yang antara lain berisi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta saran atau masukan yang diharapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen Renstra pada periode mendatang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Awal pendirian perangkat daerah bidang penanaman modal sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra.

BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan perda Nomor 13 tahun 2016 BKPMMD dan PTSP Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sultra dengan tipologi kategori “A”.

DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur hingga saat ini. DPMPTSP Prov. Sultra mempunyai tugas membantu Gubernur Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas DPMPTSP Prov. Sultra menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. Pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan ;
- e. Pelaksanaan layanan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
- f. Serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan kewenangan dan urusan dinas.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Prov. Sultra tersebut dioperasionisasikan kedalam pembagian kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja DPMPTSP Prov. Sultra. sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi;
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Tugas masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program, urusan keuangan, urusan umum dan urusan kepegawaian lingkup dinas.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - c. Seksi Promosi.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, realisasi pelaksanaan penanaman modal, membina dan memfasilitasi permasalahan penanaman modal serta pengembangan sistem informasi.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
- c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan sektor:

- a) Penanaman modal;
- b) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Perindustrian;
- d) Perdagangan;
- e) Transmigrasi;

- f) Tenaga kerja.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan sektor:

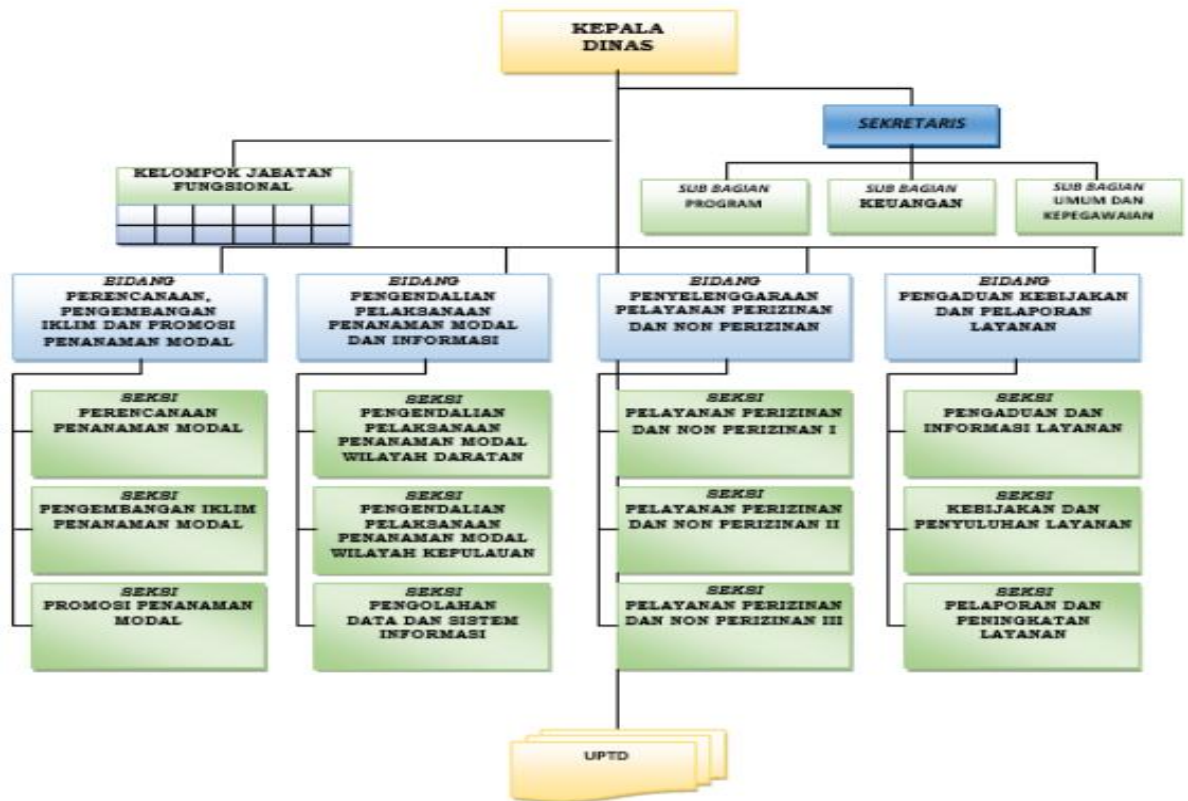
- a) Perhubungan;
- b) Komunikasi dan informasi;
- c) Energi dan sumber daya mineral;
- d) Sosial;
- e) Pariwisata;
- f) Kehutanan.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan sektor:

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Lingkungan hidup;
- c) Kesehatan;
- d) Pertanian dan peternakan;
- e) Perkebunan;
- f) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Secara keseluruhan jumlah personil DPMPTSP Prov. Sultra per 31 Desember 2022 sebanyak 51 orang. Struktur organisasi DPMPTSP Prov. Sultra tersaji pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Bagian Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara



Sebagai pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMEN PANRB) No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Selain itu juga telah terbit PERMEN PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan tersebut di atas semakin dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permendagri 25 tahun 2021 tentang DPMPTSP bertujuan sebagai pedoman pembentukan DPMPTSP yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Permendagri ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri ini untuk menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota.

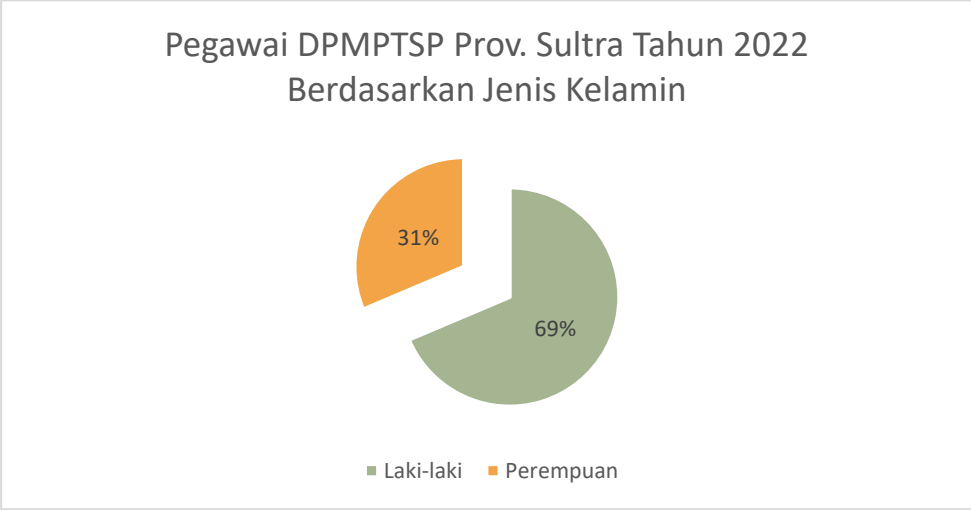
Meski sarat aturan, hingga dokumen Renstra ini disusun DPMPTSP Prov. Sultra belum merevisi struktur organisasi sebagaimana yang tersaji di atas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh DPMPTSP Prov. Sultra Per Desember 2022 sebanyak 51 orang terdiri dari 35 pegawai laki-laki dan 16 pegawai perempuan.

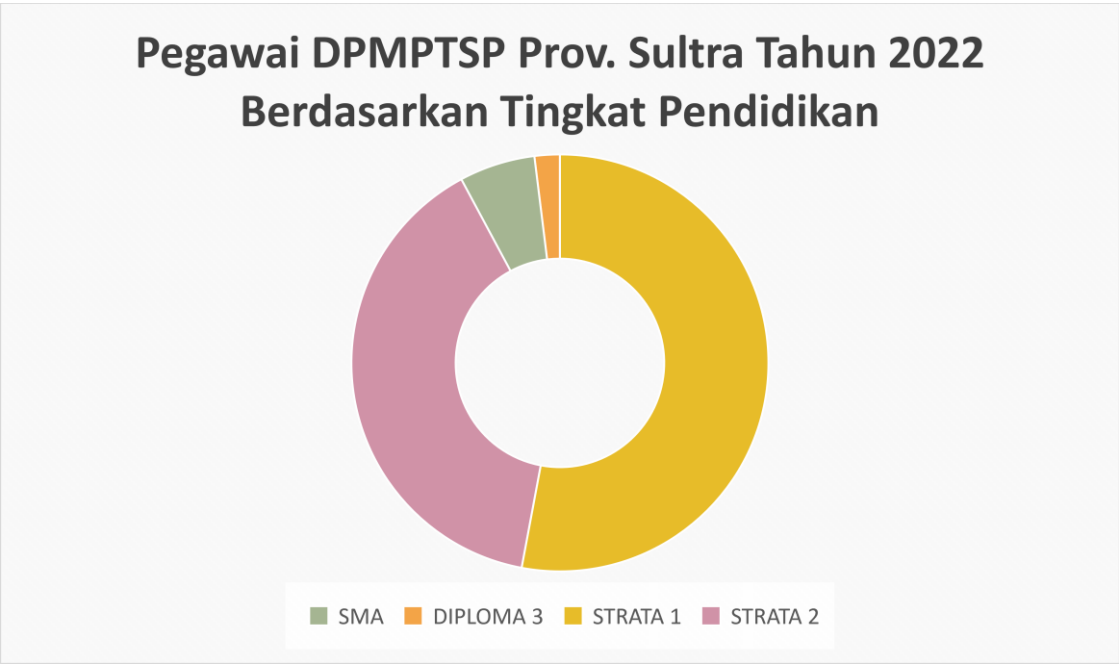
Gambar 2.2 Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SMA hingga Strata 2. Dengan rincian: SMA sebanyak 3 orang, Diploma 3 sebanyak 1 orang, terbanyak Strata 1 berjumlah 27 orang dan strata 2 berjumlah 20 orang.

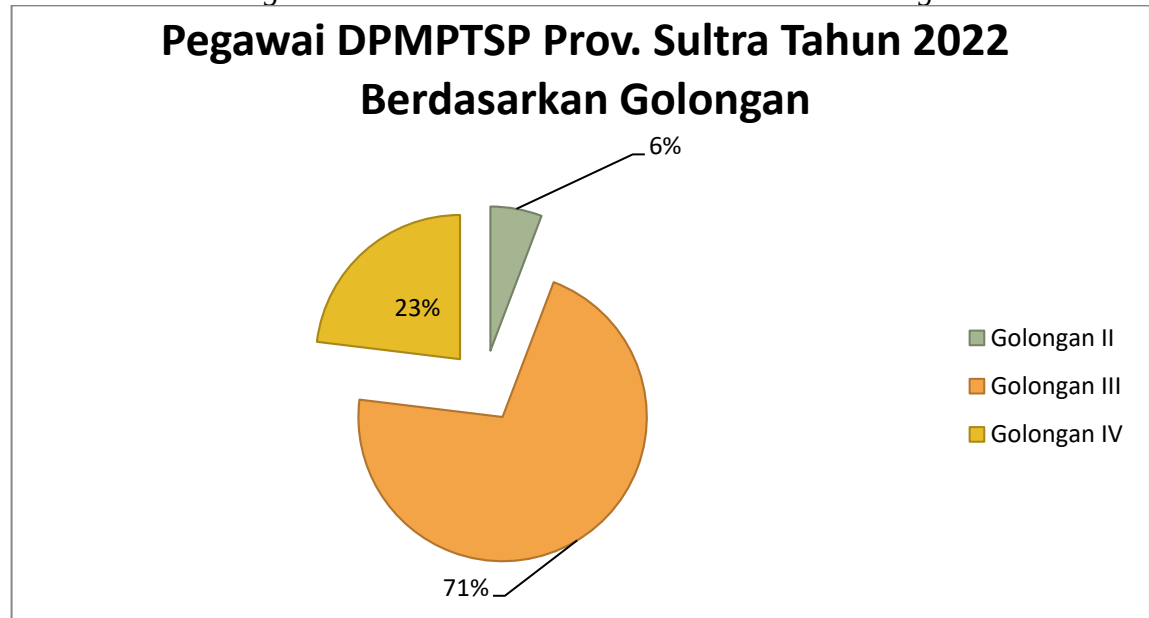
Gambar 2.3 Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan II sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 37 orang dan golongan IV sebanyak 11 orang.

Gambar 2.4 Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Berdasarkan Golongan



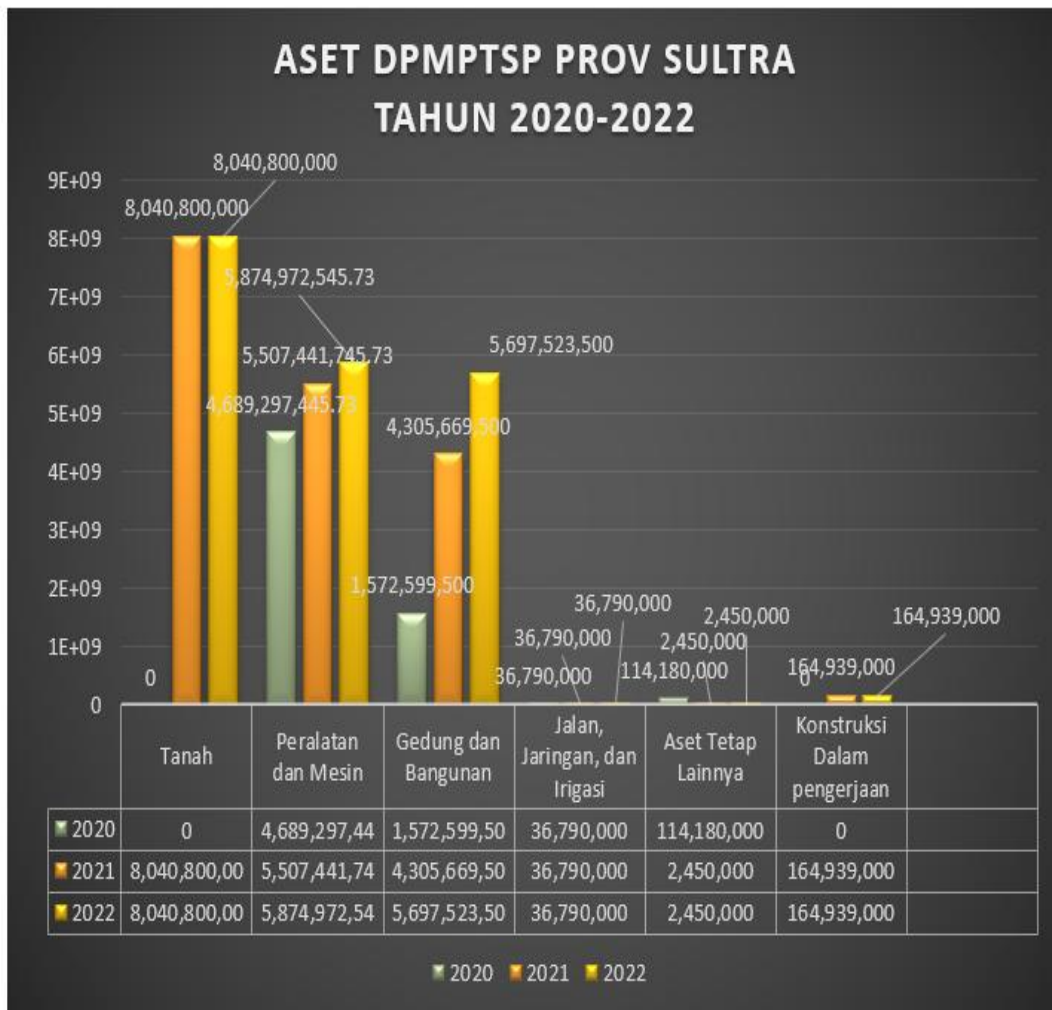
Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

2.2.2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset/modal yang dimiliki oleh DPMPTSP Prov. Sultra terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2020 sebesar Rp3.963.115.066,93 meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp14.573.280.979,93 dan mencapai Rp15.432.427.120,93 pada tahun 2020. Nilai ini diproyeksi akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Aset DPMPTSP Prov. Sultra terdiri dari aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Gambar 2.5 Perkembangan Aset DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2022



Sumber: Neraca DPMPTSPProv. Sultra (Diolah)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2018-2022 kinerja pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti relisasi investasi yang rata-rata terus meningkat dari tahun ke tahun serta melampaui angka yang ditargetkan.

Indikator kinerja utama yakni realisasi investasi tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 15,50 Triliun, terus meningkat menjadi Rp18,64 Triliun pada tahun 2019, Tercatat Rp21,13 Triliun pada tahun 2020, dan mencapai realisasi terbesar pada tahun 2021 sebesar Rp27,93 Triliun, akan tetapi pada tahun 2022 terkoreksi menjadi Rp20,19 Triliun. Realisasi Investasi PMA dan PMDN Sultra dari tahun 2018 – 2022 tersaji dalam Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Perkembangan Target & Realisasi Investasi Sultra Tahun 2018-2022

Perkembangan Target & Realisasi Investasi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2022

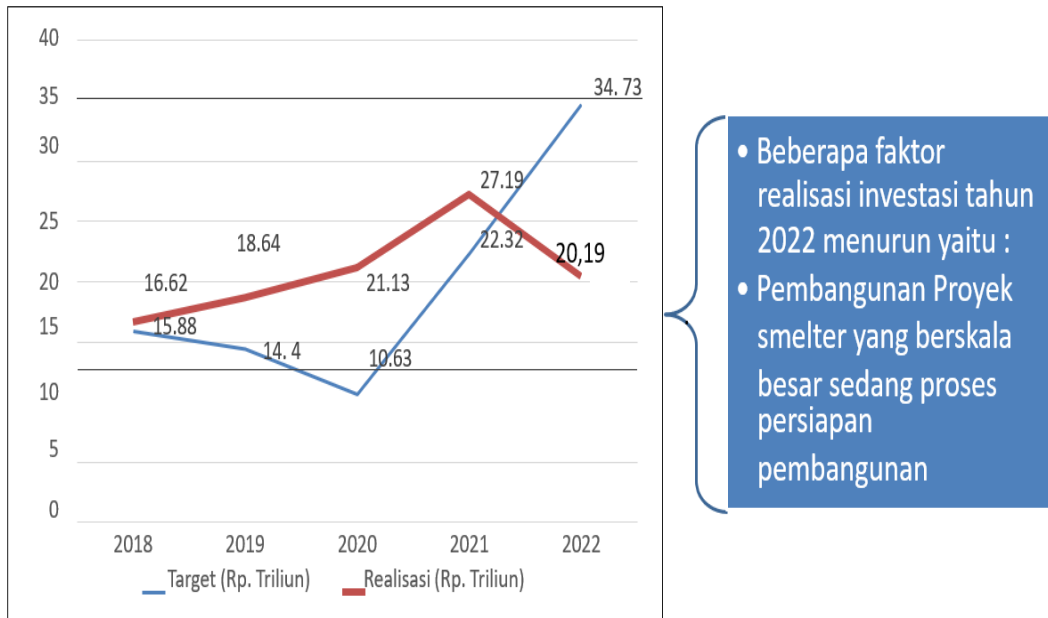
No	Tahun	Target (Rp. Triliun)	Realisasi (Rp. Triliun)	Capaian (%)
1	2018	15,88	16,62	104,59
2	2019	14,4	18,64	129,44
3	2020	10,63	21,13	198,77
4	2021	22,32	27,19	121,81
5	2022	34,73	20,19	58,16

- Target Nasional Realisasi Investasi Tahun 2022 sebesar 1.200 Triliun
- Target Sultra Tahun 2022 sebesar 34,73 Triliun
- Capaian 5 tahun terakhir selalu tercapai target
- Kecuali tahun 2022 baru mencapai 58%

Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPSTSP Prov. Sultra

Gambar 2.7 Realisasi Investasi Sultra Tahun 2018-2022

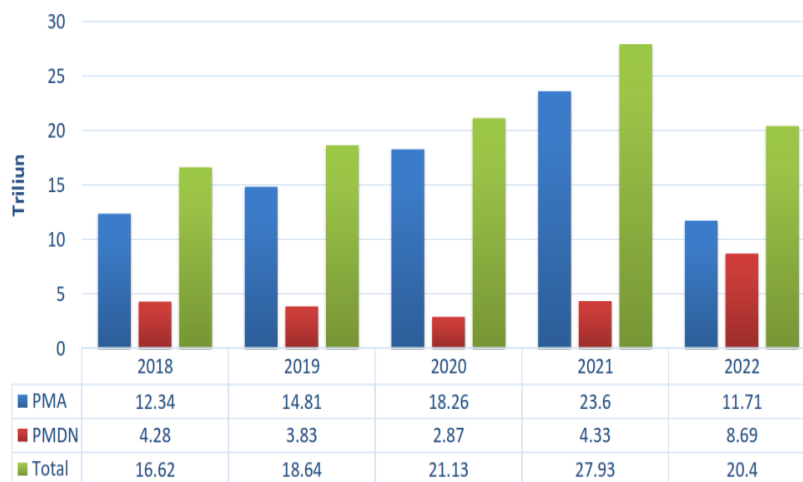
Realisasi Investasi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2022



Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Gambar 2.8 Gambaran Target Realisasi Investasi Sultra Tahun 2018-2022

Gambaran Target Realisasi Investasi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2022



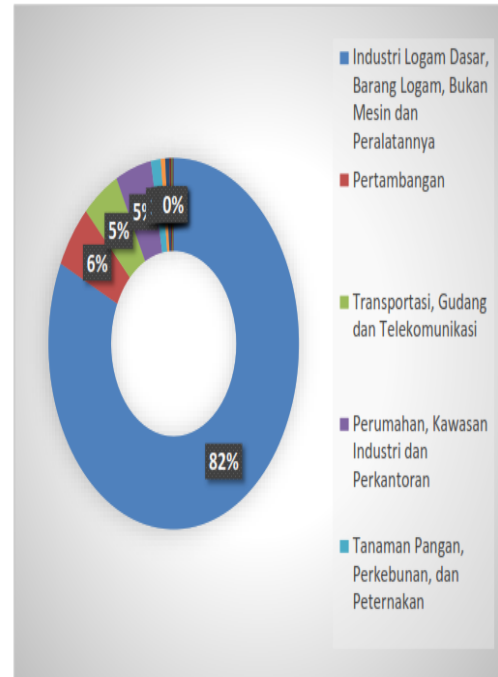
Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Faktor yang mendorong capaian realisasi investasi Sultra antara lain:

- Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sultra
- Kondusifnya iklim investasi di Sultra
- Adanya kemudahan dalam berinvestasi di Sultra
- Suksesnya promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP Prov. Sultra.

Gambar 2.9 10 Besar Realisasi Investasi Sultra Tahun 2022 Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Realisasi (Rp. Juta)
1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	8.714.706,54
2	Pertambangan	588.552,20
3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	511.225,76
4	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	489.689,73
5	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	135.208,03
6	Perdagangan dan Reparasi	59.609,61
7	Industri Makanan	54.654,52
8	Jasa Lainnya	26.854,74
9	Konstruksi	20.979,30
10	Industri Mineral Non Logam	12.235,63



Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Gambar 2.10 Proyek Kawasan Industri di Sultra

PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park (Kab. Konawe)

- PT. VDNIP telah beroperasi dan beberapa perusahaan yang berada dalam kawasan tersebut yakni:
- PT. Vitruue Dragon Nickel Industri : *Tahap operasi*
- PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) : *Tahap operasi dan Tahap Konstruksi*
- PT. First Heavy Nickel Industri (FHNI) : *Tahap Persiapan dan Konstruksi*

PT. Indonesia Konawe Industrial Park (Kab. Konawe)

- PT. IKIP : Tahap penyelesaian masalah perizinan oleh Kementerian Investasi terkait penurunan status kawasan dari hutan lindung menjadi APL
- PT. IKIP berada dalam wilayah IUP PT. Sulawesi Cahaya Mineral
- PT. Hualong Nickel Cobalt, PT. Huading Nickel Cobalt

PT. Liaoning Smelting Industrial Park (Kab. Konsel)

- PT. LSIP sedang dalam proses pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas penunjang (kantor)
- Kawasan PT. LSIP akan dibangun pabrik smelter PT. Yattoo Mega Smelter Indonesia
- Didukung oleh IUP PT. Mega Tambang Indonesia dan PT. Mega Nikel Indonesia

PT. Nusantara Industri Sejati (Kab. Konut)

- Kawasan Industri PT. NIS sedang dalam tahap pembebasan lahan

PT. Andi Nurhadi Mandiri (Kab. Konut)

- Kawasan PT. ANM sedang dalam proses persiapan dan pembangunan

**Kawasan
Industri dalam
Tahap Operasi
dan Konstruksi**

Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPPTSP Prov. Sultra

PROYEK KAWASAN INDUTRI Tahap persiapan

PT. Kendari Kawasan Industri Terpadu (Kota Kendari)

PT. Tiran Mineral (Kab. Konut)

PT. Tiran Wiwirano Mandiri (Kab. Konut)

PT. Rimau New World (Kab. Kolaka)

PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (Kab. Kolaka)

PT. Starget Mineral Asia (Kab. Konut)

PT. Avant Sino Industry Park (Kab. Konut)

PT. Sino Indo Kawasan Industri (Kab. Konut)

PT. Sumber Alam Sejahtera Sultra (Kab. Konut)

PT. Konaweha Industrial Park (Kab. Konawe)

Pt. Sulawesi Industri Molawe (Kab. Konut)

PT. Area Industri Sultra Nusantara (Kab. Konut)

**Kawasan Industri
dalam Tahap Tahap
Perizinan/NIB**

Hilirisasi sumber daya alam di Sulawesi Tenggara

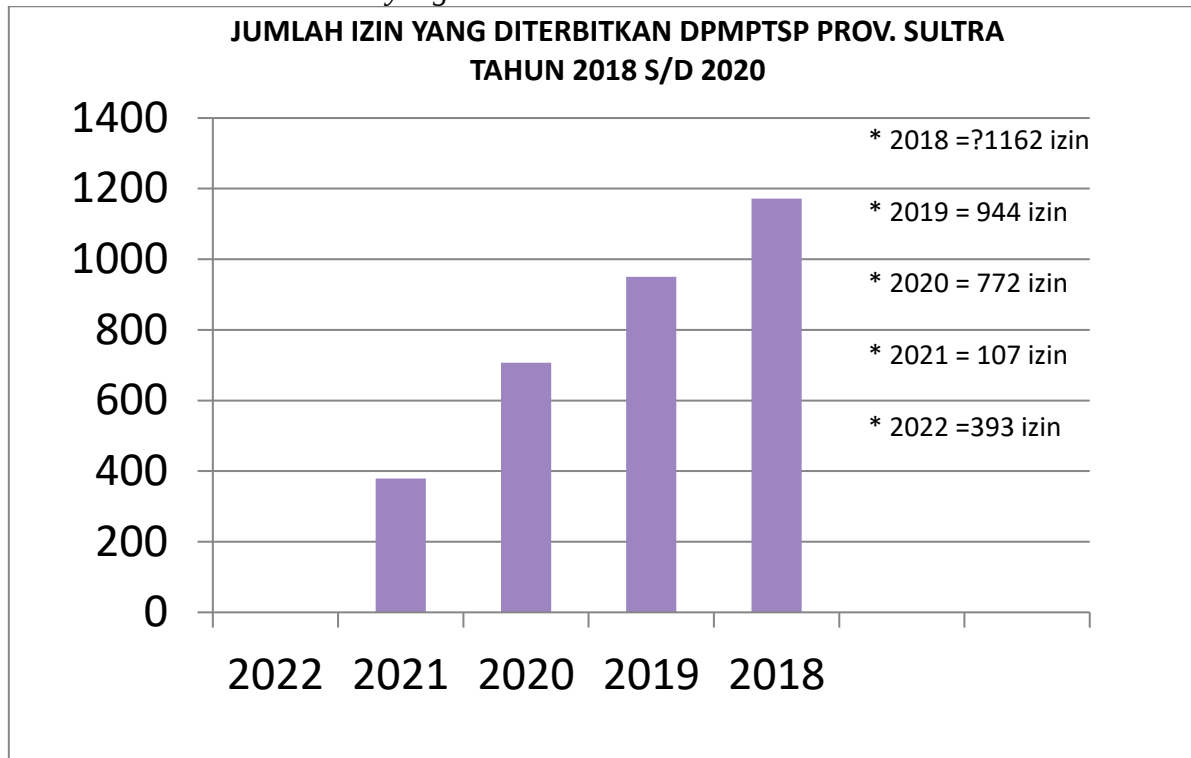
Hilirisasi SDA saat sedang berproses di berbagai sector :

- Sektor pertambangan telah beroperasi industry smelter yakni PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan Industry stainless yakni PT. Obsidian Stainless Steel
- Beberapa industry logam lainnya dalam proses pembangunan di antaranya : PT. Ceria Nugraha Indotama, PT. Kolaka Nikel Indonesia (PT. Vale Indoensia Tbk)
- Sektor Perkebunan telah beroperasi Industri Gula PT. Prima Alam Gemilang bekerjasama PT. Jhonlin Batu Mandiri (perkebunan) dalam suplay bahan baku
- Sektor perikanan dalam proses pembangunan yakni PT. MBG Susan untuk industry pembekuan dan pembenihan udang

Dan Terdapat sektor industry logam dan non logam, pertambangan, perkebunan, jasa dan perhotelan serta transportasi dalam proses perizinan

Pada aspek lain dari sisi perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Prov. Sultra juga menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2018 tercatat 1162 izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Prov. Sultra, tahun 2019 sebanyak 944 izin, 2020 sebanyak 772 izin, dan tahun 2021 menerbitkan 107 izin, sedangkan tahun 2022 sebanyak 393 izin. Perkembangan jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra ditunjukkan pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11 Jumlah Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2018-2020



Sumber: Data Izin Selesai 2018 – 2022 DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan di Sultra yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara melingkupi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI

No	Sektor Layanan	Jumlah Jenis Layanan
1	Sektor Kelautan dan Perikanan	75
2	Sektor Pertanian	83
3	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89
4	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	38
5	Sektor Ketenaganukliran	0
6	Sektor Perindustrian	522
7	Sektor Perdagangan	1
8	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0
9	Sektor Transportasi	40
10	Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan	9
11	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	0
12	Sektor Pariwisata	26
13	Sektor Keagamaan	0
14	Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik	0
15	Sektor Pertahanan dan Keamanan	0
16	Sektor Ketenagakerjaan	0
17	Sektor Koperasi	8
Total Layanan		891

Tabel 2.2 Perizinan Berusaha Non KBLI

No	Sektor Layanan	Jumlah Jenis Layanan
1	Sektor Kelautan dan Perikanan	8
2	Sektor Pertanian	7
3	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0
4	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	5
5	Sektor Ketenaganukliran	0
6	Sektor Perindustrian	0
7	Sektor Perdagangan	0
8	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
9	Sektor Transportasi	35
10	Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan	6
11	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	0
12	Sektor Pariwisata	0
13	Sektor Keagamaan	0
14	Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik	0
15	Sektor Pertahanan dan Keamanan	0
16	Sektor Ketenagakerjaan	2
17	Sektor Koperasi	0
Total Layanan		65

Tabel 2.3 Perizinan Non Berusaha Non KBLI

No	Sektor Layanan	Jumlah Jenis Layanan
1	Sektor Kelautan dan Perikanan	0
2	Sektor Pertanian	7
3	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5
4	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	4
5	Sektor Ketenaganukliran	0
6	Sektor Perindustrian	0
7	Sektor Perdagangan	0
8	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3
9	Sektor Transportasi	0
10	Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan	0
11	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	2
12	Sektor Pariwisata	0
13	Sektor Keagamaan	0
14	Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik	0
15	Sektor Pertahanan dan Keamanan	0
16	Sektor Ketenagakerjaan	0
17	Sektor Koperasi	0
18	Sosial	2
19	Perpustakaan dan Arsip	1
Total Layanan		24

Tabel 2.4 Non Perizinan yang Merupakan Kewenangan DPMPTSP

No	Sektor Layanan	Jumlah Jenis Layanan
1	Sektor Kelautan dan Perikanan	0
2	Sektor Pertanian	1
3	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2
4	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	0
5	Sektor Ketenaganukliran	0
6	Sektor Perindustrian	0
7	Sektor Perdagangan	3
8	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0
9	Sektor Transportasi	1
10	Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan	0
11	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	0
12	Sektor Parawisata	0
13	Sektor Keagamaan	0
14	Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik	0
15	Sektor Pertahanan dan Keamanan	0
16	Sektor Ketenakerjaan	0
17	Sektor Koperasi	0
18	Sosial	2
19	Perpustakaan dan Arsip	0
Total Layanan		9



Proyek-Proyek Investasi Strategis di Sulawesi Tenggara



PT Kolaka Nickel Indonesia

Rencana Investasi:
Rp 36,54 Triliun

Lokasi:
Kabupaten Kolaka
Bidang Usaha:
Smelter Nikel

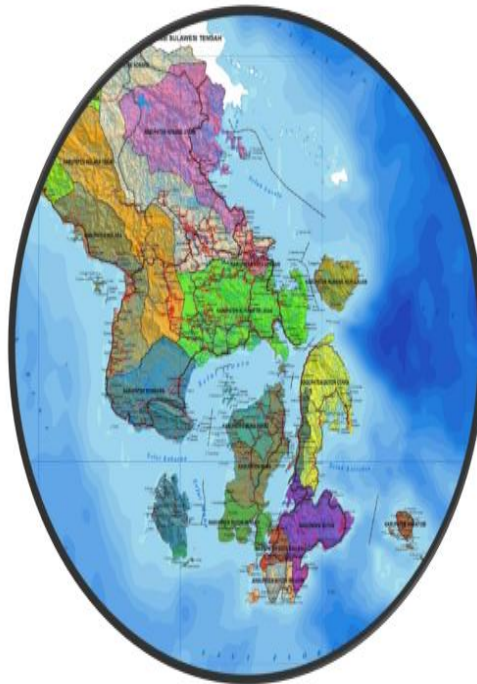
PT Ceria Metalindo Prima

Lokasi:
Kabupaten Kolaka
Bidang Usaha:
Smelter Nikel
Rencana Investasi:
Rp 4,43 Triliun

PT Sungai Raya Nickel Alloy

Lokasi:
Kabupaten Konawe Selatan
Bidang Usaha : **Smelter Nikel**

Total Rencana Investasi:
Rp 12 Triliun



PT Obsidian Stainless Steel

Lokasi:
Kabupaten Konawe
Bidang Usaha :
Smelter Nikel
Total Rencana Investasi:
Rp 34,24 Triliun

PT First Heavy Nickel Industry

Lokasi:
Kabupaten Konawe
Bidang Usaha :
Smelter Nikel
Total Rencana Investasi:
Rp 30,23 Triliun

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

*Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021-2022 dan
Proyeksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023-2024*

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rp 34,73 Triliun	-	Rp 10,63 Triliun	Rp18 Triliun	Rp 21.73 Triliun	Rp 21.73 Triliun	Rp 27,93 Triliun	Rp 20,19 Triliun	Rp 21.73 Triliun	Rp 21.73 Triliun	Jumlah Realisasi Investasi (PMDN/PMA) tahun 2021 mencapai Rp 27,93 Triliun, menurun 27,71% pada tahun 2022 menjadi Rp 20,19 Triliun
2	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A	-	A (-)	A	A	A	A (-)	A (-)	A	A	Dinilai oleh KEMENPAN RB berdasarkan sejumlah indikator pelayanan publik

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3	Adanya PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Adanya PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Adanya PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian	Adanya Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian	Adanya Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum ada SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal. Bidang yang membidangi masih menyusun rumusan konsep sehingga pada

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	fasilitas/insentif penanaman modal	fasilitas/insentif penanaman modal	fasilitas/insentif penanaman modal									saat mengusulkan anggaran sudah tersaji KAK yang jelas agar kegiatan mencapai output yang ditargetkan
5	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedia Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedia Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum tersedia Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal. Bidang yang membidangi masih menyusun rumusan konsep sehingga pada saat mengusulkan anggaran sudah tersaji KAK yang jelas agar kegiatan mencapai output yang ditargetkan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
6	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Terlaksananya Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	Terlaksananya Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya 1 Kegiatan Forum Investasi di SwissBell Hotel Kendari
7	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Terlaksananya kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Terlaksananya kegiatan penerimaan misi penanaman modal					1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya 1 kegiatan penerimaan misi penanaman modal yaitu dari Negara Slovakia Terkait Potensi Rumput Laut Kab.Wakatobi dan Kota Bau-Bau Masih Dalam Bentuk Konsep

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
8	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pameran penanaman modal	Terlaksananya Kegiatan pameran penanaman modal	-	-	-	-	4 Kegiatan	6 Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kegiatan pameran penanaman modal yang diikuti/ dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan yaitu:
												1. HPN Pameran. Investasi 2022
												2. Pameran Umkm
												3. Pameran GTRA 2022
												4. Pameran Hut Sultra 58
												5. Pameran Kolut.
												6. Sultra Properti Expo
9	Jumlah perusahaan/perorangan yang berkonsultasi	-	Terlaksananya konsultasi perizinan dan non	-	-	-	-	300 Perusahaan/	310 Perusahaan/	300 Perusahaan/	300 Perusahaan/	Sebanyak 310 Pelayanan Konsultasi Perizinan Penanaman Modal Capaian dihitung berdasarkan Daftar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	mengenai perizinan dan non perizinan penanaman modal		perizinan penanaman modal					Perorangan	Perorangan	Perorangan	Perorangan	Perusahaan/ Perorangan yang Melakukan Konsultasi
10	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Terselenggaranya penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Terselenggaranya penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebanyak 1019 Izin yang Diterbitkan DPMPSTSP Prov. Sultra. Capaian dihitung berdasarkan Daftar Rekapitulasi Izin Terbit Tahun 2022
11	Jumlah laporan realisasi penanaman modal	Tersedia laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Tersedia laporan realisasi penanaman modal	-	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Tersedia Laporan realisasi penanaman modal dikemas dalam Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
												PMA dan PMDN Per Triwulan untuk perusahaan yang sudah beroperasi dan persemester untuk yang tahap konstruksi
12	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Pegawai mendapatkan Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Pegawai mendapatkan Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	-	-	-	-	50 ASN	53 ASN	53 ASN	53 ASN	Sebanyak 53 ASN mengikuti Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
13	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Terlaksananya Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Terlaksananya Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	-	-	-	-	39 Perusah aan	42 Perusah aan	42 Perusah aan	42 Perusah aan	Sebanyak 42 Perusahaan mendapatkan Pembinaan Penanaman PMA dan PMDN dari DPMPTSP Prov. Sultra
14	Jumlah Kabupaten/Kota yang tersedia data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	-	-	17 Kabupa ten/Kot a	17 Kabupa ten/Kot a	17 Kabupa ten/Kot a	17 Kabupa ten/Kot a	Tersedianya Data Monev DPMPTSP Dari 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
15	Persentasi Peningkatan Investasi Sultra	Target Tercapai	Meningkat	-	-	-	-	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat	Berdasarkan Data LKPM yang dihimpun melalui LKPM Online dan telah diverifikasi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (KEMENIV/BKPM RI) tercatat Investasi Sultra menurun 27,71% atau hanya Rp 20,19 triliun dibanding tahun 2021 yang mencapai Rp 27,93 Triliun.

Sumber: LPPD dan LAKIP DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2022 (Diolah)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Saat ini DPMPTSP di Indonesia memasuki era perizinan berbasis risiko. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sebagai sebuah sistem yang terbilang baru tentu menghadapi berbagai tantangan untuk penyempurnaan aplikasi.

Tantangan OSS RBA antara lain:

1. Pengiriman email notifikasi seperti registrasi, aktivasi, *reset password* yang gagal. Adapun upaya perbaikan atau penyempurnaan yang dilakukan oleh BKPM adalah dengan memastikan kembali apakah alamat email tujuan sudah benar, apabila salah akan dilakukan perbaikan alamat email, mengirimkan ulang email notifikasi kepada pelaku usaha, dan memperbaiki *bugs* sehingga meminimalkan tingkat kegagalan email notifikasi.
2. Pada saat penggantian hak akses OSS 1.1 ke OSS Berbasis Risiko, NIB yang seharusnya terdaftar untuk hak akses yang sama tidak terbaca atau tidak tampil.
3. Duplikasi email pendaftaran hak akses. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya email yang telah digunakan untuk mendaftarkan hak akses OSS 1.1 namun belum memiliki perizinan berusaha. BKPM pun melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan cara menonaktifkan hak akses OSS 1.1 yang belum memiliki perizinan berusaha, sehingga email tersebut dapat digunakan kembali untuk mendaftar hak akses OSS Berbasis Risiko.

4. Produk salah pada NIB dan perizinan berusaha lainnya yang telah berlaku efektif pada OSS 1.1. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaan sistem, BKPM memperbaiki bugs sehingga pelaku usaha dapat mengunggah produk yang benar atas NIB dan perizinan berusaha lainnya yang telah berlaku efektif pada OSS 1.1, serta mengirimkan email pemberitahuan kepada pelaku usaha bahwa NIB dan perizinan berusaha lainnya tersebut telah diperbaiki.
5. Perpanjangan perizinan berusaha. Terkait kendala dan hambatan ini, BKPM tengah melakukan pengembangan fitur perpanjangan perizinan berusaha dan dapat segera digunakan oleh pelaku usaha.
6. Tantangan dalam konsultasi virtual dimana janji untuk konsultasi virtual hanya dapat diperjanjikan setelah proses login. Hal ini menjadi tantangan bagi investor baru untuk melakukan konsultasi virtual dengan BKPM. Bahkan ditemukan beberapa akun memiliki error saat membuat janji konsultasi virtual seperti tombol tidak dapat ditekan.
7. Sinkronisasi terhadap akun dan data OSS v.1.1, dan data dari Kemenkumham. Dalam OSS Berbasis Risiko, permohonan untuk meminta akun dan kata sandi baru tidak selalu berhasil, termasuk untuk akun yang sudah dibuat sejak OSS v.1.1. kemudian data seperti NIB dan Izin Usaha akun OSS dalam V1.1 tidak langsung termigrasi ke OSS RBA ketika login berhasil. Migrasi data dari Kemenkumham ke akun OSS RBA tidak selalu berhasil untuk setiap akun, dan tidak tersedia fitur “force sync” atau semacamnya.
8. Perizinan berusaha belum seluruhnya tersedia. Beberapa fitur untuk melakukan permohonan memperoleh perizinan berusaha tidak seluruhnya tersedia, sebagai contoh Tanda Daftar Perusahaan Secara Elektronik (TDPSE) untuk Kantor Perwakilan

Perusahaan Perdagangan di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (KP3PMSE) dan penyelenggara asing dan terkait Sertifikat Standar.

9. Belum terdapat fitur untuk melakukan pelaporan LKPM, fitur untuk melakukan penggantian kepala Refraksionis Optisien (RO), dan fitur sehubungan dengan KP3PMSE.
10. Penggunaan Peta Polygon. Penggunaan peta polygon untuk pengajuan lokasi usaha dirasa lebih sulit dibandingkan menggunakan peta koordinat seperti yang OSS v.1.1. Apabila tidak memiliki sumber daya yang mumpuni, Pelaku Usaha perlu menggunakan jasa pihak ketiga untuk dapat membuat peta polygon.

Dibalik banyaknya tantangan terdapat pula sejumlah peluang untuk perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha kepada publik.

Peluang OSS RBA diantaranya:

1. PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah cukup memberikan kepastian hukum dan komprehensif dalam mengatur OSS Berbasis Risiko.
2. Proses perizinan semakin sederhana, transparan, dan akuntabel.
3. Proses perizinan dapat dilakukan kapanpun, dimanapun.

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Prov. Sultra adalah investor/pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

*Gambar 2.12 Dokumentasi Rapat Ekspose Rencana Kerja 2023 dan Kinerja 2022 DPMPTSP se-Sultra
Hotel Kubah 9 Kendari, 24 Februari 2023*





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja DPMPTSP Prov. Sultra pada periode Renstra 2018-2023 perumusan permasalahan perangkat daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintah untuk memperbaiki kegagalan yang terjadi dimasa sebelumnya, serta untuk mempertahankan bahkan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya.

Hasil identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra meliputi:

1. Belum ada petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2021, sehingga masyarakat yang akan mengurus izin terkait kewenangan yang diatur dalam Perpres tersebut, harus menunggu, karena bukan kewenangan pusat, namun daerah belum ada legalitas operasional kewenangan;
2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur aplikasi OSS (*Online Single Submission*);
3. Sebagian perizinan belum sesuai dengan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
4. Data yang tidak akurat, terdapat perbedaan data antara yang tertera pada dokumen perizinan perusahaan dengan kondisi empiris yang dijumpai di lapangan. Misalnya peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan izin, titik koordinat yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.

5. Banyaknya proyek-proyek mangkrak yang tidak terpantau, dijumpai sejumlah perusahaan yang hanya berinvestasi aset tetap seperti tanah dan bangunan namun tidak melakukan kegiatan operasional. Hal ini tentu tidak sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan menjadikan sektor investasi sebagai pencipta lapangan pekerjaan.
6. Kesadaran Investor/pelaku usaha PMA dan PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perlu ditingkatkan lagi.
7. Akurasi Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai perlu ditingkatkan.
8. Sistem dan implementasi OSS RBA perlu dioptimalkan
9. Sumber daya aparatur DPMPTSP Prov. Sultra masih perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia antara lain BinteK tata cara pencabutan izin penanaman modal, tata cara perizinan berbasis risiko, tata cara pengawasan izin melalui *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)*.
10. Tidak tersedia mobil operasional lapangan, lokasi perusahaan di Sultra sebagian letaknya jauh dari pusat kota, medannya pun seringkali kurang bersahabat, sehingga diperlukan kendaraan operasional lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
11. Regulasi perizinan dan nonperizinan yang berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat, sehingga senantiasa dibutuhkan sinkronisasi.
12. Program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pemenuhan indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama perlu diprioritaskan.

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan investasi dan PTSP saat ini antara lain adalah:

1. Penguatan daya saing investasi melalui penyiapan IPRO (*Investment Product Ready to Offer*) yakni data peluang investasi yang *clean and clear*, bersesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilaya (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), lahan yang dibebaskan, disertai perhitungan-perhitungan investasi yang jelas mengenai *payback periode*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Benefit Cost Ratio (BCR)*, serta *Net Present Value (NPV)*.

Pembuatan IPRO ini tidak mudah dan tidak murah untuk itu diharapkan pemerintah daerah Prov. Sultra dapat mengupayakan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran IPRO dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

2. Pengembangan hilirisasi industri disektor Pertambangan, perikanan, perkebunan dan pertanian.
3. Perlunya pemerintah daerah mendorong hilirisasi yaitu proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
4. Pengembangan industri baterai untuk motor listrik di Sultra khususnya di Kawasan PT. IKIP Kab. Konawe.
5. Target realisasi investasi nasional Tahun 2023 sebesar $\pm$ 1.400 Triliun, menunjukkan bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi disektor swasta yang cukup tinggi.
6. Identifikasi proyek-proyek besar sebagai prioritas realisasi investasi Tahun 2023.

7. Eksekusi penyelesaian permasalahan proyek-proyek yang mangkrak, terkendala perizinan.
8. Memperbanyak sosialisasi LKPM *online* kepada pelaku usaha.
9. Bekerja sama dengan grup BUMN, Kadin, Hipmi, Asosiasi pengusaha terkait kewajiban LKPM.
10. Optimalisasi pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan RPD dirumuskan dengan mengacu pada misi RPJD karena daerah tidak memiliki kepada daerah terpilih sehingga harus mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang daerah, dan melihat kesesuaian dengan program yang dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan yang disusun berdasarkan gambaran umum wilayah, permasalahan pembangunan yang sedang terjadi, serta isu-isu strategis yang sedang berlangsung baik itu isu global, isu nasional maupun isu daerah, sekurang-kurangnya juga memuat tujuan dan sasaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap, serta mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan.

Sasaran RPD 2024-2026 juga diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RPD. Secara skematik keterkaitan antara visi dan misi RPJPD dengan

perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 sampai dengan tahun 2026 dikelompokkan sebagai berikut:

Tujuan 1 Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul & kompetitif dengan indikator indeks pembangunan manusia

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan sasaran dan indikator:

- Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dengan Indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
- Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup

Tujuan 2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik dengan indikator Persentase Penduduk Miskin

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan sasaran dan indikator:

- Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat dengan indikator Pengeluaran Perkapita disesuaikan dan Nilai Tukar Petani
- Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat dengan indikator Gini Ratio
- Meningkatnya Ketersediaan, Akses, & Kualitas Konsumsi Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan dan Prevalensi Stunting
- Indikator Angka Harapan Hidup

Tujuan 3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan sasaran dan indikator:

- Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Sektor Unggulan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha
- Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja & Akses Terhadap Lap. Kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
- Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi dengan Indikator Pertumbuhan Investasi I Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
- Meningkatnya konektivitas antarwilayah dengan indikator Indeks Infrastruktur
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dengan indikator Indeks Resiko Bencana.

Tujuan 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan sasaran dan indikator:

- Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Opini Laporan Keuangan dan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik.

Berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi Sulawesi Tenggara yang teruang dalam dokumen RPD, DPMPTSP Prov. Sultra melakukan penyelerasan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1.

*Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026*

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp25,61 Triliun	Rp13,28 Triliun	Rp15,96 Triliun
2	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP PD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	BB	BB	A
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Nilai pelayanan publik PTSP	A (-)	A (-)	A

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2024-2026 mendatang DPMPTSP Prov. Sultra memiliki 3 tujuan dan 3 sasaran strategis. Tujuan jangka menengah DPMPTSP terdiri atas:

1. Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas
2. Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran jangka menengah DPMPTSP yaitu:

1. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP

Sinkronisasi tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Prov. Sultra dengan RPD Prov. Sultra tahun 2024 – 2026 tersaji dalam *casecading* pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Casecading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	TUJUAN: Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	BERKEMBANGNYA IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi	investor
3.3. Meningkatnya kualitas iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	SASARAN: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Terkait Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan
						Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Perda
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Potensi Investasi Unggulan Provinsi Sultra yang Dipetakan	Potensi Unggulan
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Perda RUPMP
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Peta potensi

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	TUJUAN: Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	TERPUBLIKASINYA PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah media publikasi promosi penanaman modal	media
3.3. Meningkatnya kualitas iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	SASARAN: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Perda
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tertaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	TUJUAN: Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp.
3.3. Meningkatnya kualitas iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	SASARAN: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp.
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Proyek
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Telaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	orang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Proyek

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat (Nilai)	TUJUAN: Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP PD	Predikat (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	TERSELENGGARANYA PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSEN
4.1 Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Predikat (Nilai)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	Predikat (Nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen
						Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen
						Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tertaksananya Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tertaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah	Dokumen
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tertaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
						Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertaksananya Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tertaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan
						Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tertindakannya Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tertindakannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertindakannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tertindakannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tertindakannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertindakannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tertindakannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tertaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tertaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tertaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen
						Penyediaan Bahan/Material	Tertaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Unit
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit
						Pengadaan Mebel	Tertaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertindakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tertindakannya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertindakannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tertindakannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	unit
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	Laporan
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertindakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertindakannya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit
						Pemeliharaan Mebel	Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Set
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pelihara/ Rehabilitasi	Gedung
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	Paket
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor yang dilaksanakan	Paket
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan pelayanan Publik	Nilai	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	TERLAKSANANYA PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	NILAI
4.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan pelayanan Publik	Nilai	SASARAN: Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Nilai pelayanan publik PTSP	Nilai	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota	Tersedianya Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Regulasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disusun	Dokumen

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tertindakannya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Orang
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Tertindakannya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tertindakannya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Nonperizinan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Orang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah Kabupaten/ Kota	orang
						Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin Kewenangan Daerah Provinsi yang diterbitkan	izin
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tertindakannya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	orang

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Tertaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	kegiatan usaha
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tertaksananya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terhadap Terkait Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Orang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan usaha
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan pelayanan Publik	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Tertaksananya PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN MELALUI SISTEM INFORMASI	IZIN
4.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan pelayanan Publik	Nilai	SASARAN: Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Indeks pelayanan PTSP	Nilai	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tertaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Data dan Informasi

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	POGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tertelaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Orang
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Tertelaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tertelaksananya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Nonperizinan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Orang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tertelaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah Kabupaten/ Kota	orang
						Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin Kewenangan Daerah Provinsi yang diterbitkan	izin
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tertelaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	orang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah DPMPTSP Prov. Sultra dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Investor/ DPMPTSP Se-Sultra/Aparat Penegak Hukum/ Legislatif	Menyusun/mengimplementasikan regulasi terkait kemudahan berinvestasi
				Penguatan strategi promosi investasi
				Akurasi data perusahaan PMA/PMDN
				Penanganan permasalahan penanaman modal
				Pembinaan pelaku usaha
				Mengoptimalkan penggunaan Dekon dan DAK
2	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
				Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
				Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian
				Memberikan keterbukaan informasi kepada publik
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Mewujudkan PTSP Prima	Menguatkan regulasi perizinan dan nonperizinan
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
				Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur
				Memenuhi NSPK pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada periode Renstra 2024-2026, DPMPTSP Prov. Sultra memiliki 6 program, 14 kegiatan dan 69 kegiatan. Program tersebut mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); yang disempurnakan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4189/Keuda tanggal 12 Oktober 2020; serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/5889/Keuda tanggal 27 Desember 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upayayang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai Instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak/dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Rencana program kerja DPMPTSP Prov. Sultra meliputi 6 program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
5. Program Pelayanan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi

Program tersebut dijabarkan dalam 15 kegiatan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota
2. Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
3. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
4. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
5. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
6. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
7. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Administrasi Umum Perangkat Daerah

15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program dan kegiatan tersebut di atas diimplementasikan menjadi 66 sub kegiatan mencakup:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
7. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
9. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
10. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
11. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
12. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

13. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
14. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
15. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
21. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
26. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
27. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
28. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
29. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
30. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
31. Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
32. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

33. Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
34. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
35. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
36. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
37. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
38. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
39. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
40. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
41. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
43. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
44. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
45. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
46. Penyediaan Bahan/Material
47. Fasilitasi Kunjungan Tamu
48. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
51. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
52. Pengadaan Mebel
53. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

54. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
55. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
56. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
57. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
58. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
59. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
61. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
62. Pemeliharaan Mebel
63. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
64. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
65. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
66. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Rencana Program, Kegiatan, dan Kerangka pendanaan disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang mendapatkan insentif investasi	6 Investor	2 Investor	370.000.000	2 Investor	1.000.000.000	2 Investor	370.000	2 Investor	1.740.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	500.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI	Dalam dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
PMDN yang berkualitas							Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kewenangan daerah provinsi									PENANAMAN MODAL		
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	- Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000	- Dokumen	-	2 Dokumen	350.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	2	18	2	1.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif	4 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	10 Kegiatan Usaha	150.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI	Dalam dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
PMDN yang berkualitas	PMA dan PMDN						dan Kemudahan Penanaman Modal	dan Kemudahan Berusaha Di Daerah							Usaha		PENANAMAN MODAL		
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Potensi Investasi Unggulan Provinsi Sultra yang ditetapkan	Potensi Unggulan	6 Potensi Unggulan	320.000.000	6 Potensi Unggulan	600.000.000	6 Potensi Unggulan	320.000.000	5 Potensi Unggulan	1.240.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Pergub	1 Raperda	70.000.000	1 Perda	350.000.000	- Dokumen	70.000.000	1 Perda	490.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Peta Potensi	1 Peta Potensi	250.000.000	1 Peta Potensi	250.000.000	1 Peta Potensi	250.000.000	4 Peta Potensi	750.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	2	1.02	5	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	2 Dokumen	250.000.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Media publikasi promosi penanaman modal	10 media	4 media	1.500.000	4 media	1.850.000	4 media	1.850.000	4 media	55.200.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	3	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	14 kegiatan	4 kegiatan	1.500.000	5 kegiatan	1.850.000	4 kegiatan	1.850.000	32 kegiatan	5.200.000	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	3	1.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	'- dokumen	'- dokumen	1 dokumen	350.000.00	'- dokumen	350.000.00	1 dokumen	700.000.00	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah	
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	3	1.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	19 dokumen	4 dokumen	1.500.000.00	4 dokumen	1.500.000.00	4 dokumen	1.500.000.00	31 dokumen	4.500.000.00	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dalam dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi PMA dan PMDN	Rp 20,19 Triliun	Rp 21,73 Triliun	1.106.000.000	Rp 22,5 Triliun	1.375.000.000	Rp 23 Triliun	1.106.000.000	Rp 23 Triliun	3.587.000.000	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab/Kota se-Sultra	
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	5	1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp20,19 Triliun	Rp 21,73 triliun	1.106.000.000	Rp 21,73 triliun	1.375.000.000	Rp 21,73 triliun	1.106.000.000	Rp 21,73 triliun	3.587.000.000	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten/Kota se-Sultra	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	2	18	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	908 orang	700 orang	665.000.000	950 orang	902.500.000	700 orang	665.000.000	325 orang	2.232.500.000	BIDANG PENGENDALIAN	Kabupaten/Kota Sulawesi
Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Mewujudkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	2	18	5	1.01	4	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;	42 proyek	42 proyek	441.000.000	45 proyek	472.500.000	42 proyek	441.000.000	171 proyek	1.354.500.000	BIDANG PENGENDALIAN	Kabupaten/Kota Sulawesi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program <i>(Outcome)</i> dan Kegiatan <i>(Output)</i>	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
							serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha												
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG UNRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 PERSENT	100 PERSENT	12.463.000	100 PERSENT	13.428.000	100 PERSENT	14.343.000	100 PERSENT	64.745.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	34 dokumen	13 dokumen	355.000.00	13 dokumen	355.000.00	13 dokumen	355.000.00	85 dokumen	1.065.000.00	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10dokumen	2 dokumen	150.000.00	2 dokumen	150.000.00	2 dokumen	150.000.00	16 dokumen	450.000.00	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.01	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD & Lap hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	14 dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.01	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD & Lap hasil koordinasi penyusunan dokumen	8 dokumen	1 dokumen	50.000.000	11	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	11 dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	penyelenggaraan pemerintahan daerah							perubahan RKA-SKPD												
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.01	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD & laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 laporan	7 laporan	50.000.000	7 laporan	50.000.000	7 laporan	50.000.000	37 laporan	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	4 dokumen	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	7 dokumen	165.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1		Adm Keuangan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Adm Keuangan Perangkat daerah	108 dokumen	28 dokumen	6.285.000.000	28 dokumen	6.785.000.000	28 dokumen	7.285.000.000	190 dokumen	20.355.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
	pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang	60 orang	6.000.000.00	65 orang	6.500.000.00	60 orang	7.000.000.00	238 orang	19.500.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.02	2	Penyediaan Adm pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Adm pelaksanaan tugas ASN	48 dokumen	12 dokumen	200.000.00	12 dokumen	200.000.00	12 dokumen	200.000.00	84 dokumen	600.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	penyelenggaraan pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.02	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD	4 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	7 dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.02	6	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	7 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.02	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD & laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	48 laporan	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	84 laporan	180.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	pemerintahan daerah							Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD											
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.02	8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	7 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.03		Adm barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen Adm barang milik daerah	12 dokumen	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	penyelenggaraan pemerintahan daerah																			
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.03	1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	7 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.03	6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	7 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.03	7	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	4 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	7 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.05	Adm kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan Adm kepegawaian perangkat daerah	48 laporan	9 laporan	376.000.000	9 laporan	376.000.000	9 laporan	376.000.000	40 laporan	663.000.000	SEKRETARIAT	Kendari	
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.05	1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	'- unit	-	'- unit	-	'- unit	-	1 unit	-	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
	penyelenggaraan pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.05	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	11 paket	4 paket	216.000	4 paket	216.000	4 paket	216.000	23 paket	648.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.05	4	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	7 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	7 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
	pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	190 orang	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	190 orang	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
	penyelenggaraan pemerintahan daerah																			
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	190 orang	150.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan Luar daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.06		Adm umum perangkat daerah	Jumlah laporan Adm umum perangkat daerah	48 laporan	122 laporan	1.324.000.000	122 laporan	1.324.000.000	122 laporan	1.324.000.000	777 laporan	3.972.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 paket	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	7 paket	150.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	20 unit	500.000.00	20 unit	500.000.00	20 unit	500.000.00	100 unit	1.500.000.00	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	2 paket	100.000.00	2 paket	100.000.00	2 paket	100.000.00	10 paket	300.000.00	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	penyelenggaraan pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 paket	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	26 paket	150.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 paket	12 paket	50.000.000	12 paket	50.000.000	12 paket	50.000.000	84 paket	150.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	20 dokumen	5.000.000	20 dokumen	5.000.000	20 dokumen	5.000.000	108 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)						
	pemerintahan daerah																				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.06	7	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	4 paket	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.06	8	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	42 laporan	12 laporan	54.000.000	12 laporan	54.000.000	12 laporan	54.000.000	78 laporan	162.000.000	SEKRETARIAT	Kendari		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	penyelenggaraan pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	50 laporan	500.000.000	50 laporan	500.000.000	50 laporan	500.000.000	350 laporan	1.500.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	4 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	6 dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)						
	pemerintahan daerah																				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	70 unit	13 unit	1.960.000.000	13 unit	1.965.000.000	13 unit	1.970.000.000	77 unit	21.443.000.000	SEKRETARIAT	Kendari		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.07	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	14 unit	2 unit	60.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	70.000.000	20 unit	195.000.000	SEKRETARIAT	Kendari		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	penyelenggaraan pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.07	5	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 paket	3 paket	100.000	3 paket	100.000	3 paket	100.000	16 paket	300.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	5 unit	500.000.00	5 unit	500.000.00	5 unit	500.000.00	21 unit	1.500.000.00	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.07	7	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	300.000.00	1 unit	300.000.00	1 unit	300.000.00	4 unit	900.000.00	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)						
	pemerintahan daerah																				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	1 unit	500.000	1 unit	500.000	1 unit	500.000	8 unit	1.500.000	SEKRETARIAT	Kendari		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan	5 unit	1 unit	500.000	1 unit	500.000	1 unit	500.000	8 unit	1.500.000	SEKRETARIAT	Kendari		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	penyelenggaraan pemerintahan daerah					atau bangunan lainnya	lainnya yang disediakan												
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan	48 laporan	17 laporan	920.000.00	17 laporan	1.020.000.00	17 laporan	1.120.000.00	68 laporan	12.488.000	SEKRETARIAT	Kendari	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	8 laporan	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	15.000.000	14 laporan	45.000.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	4 laporan	12 laporan	500.000.000	12 laporan	600.000.000	12 laporan	700.000.000	40 laporan	1.800.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)						
	pemerintahan daerah																				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.08	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	4 laporan	15.000.000	SEKRETARIAT	Kendari		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	2	18	1	1.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	2 laporan	400.000.000	2 laporan	400.000.000	2 laporan	400.000.000	10 laporan	1.200.000.000	SEKRETARIAT	Kendari		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	penyelenggaraan pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	48 unit	40 unit	1.228.000.00	47 unit	1.588.000.00	54 unit	1.898.000.00	183 unit	4.714.000.00	SEKRETARIAT	Kendari	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	12 unit	100.000.00	14 unit	200.000.00	16 unit	200.000.00	52 unit	600.000.00	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.09	5	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 set	1 set	3.000.000	1 set	3.000.000	1 set	3.000.000	8 set	9.000.000	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode			
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah			
	pemerintahan daerah																			
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 unit	20 unit	25.000.000	25 unit	35.000.000	30 unit	45.000.000	179 unit	105.000.000	SEKRETARIAT	Kendari	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.09	9	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 gedung	1 gedung	400.000.00	1 gedung	500.000.00	1 gedung	600.000.00	4 gedung	1.500.000.00	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan	2	18	1	1.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 paket	3 paket	300.000.00	3 paket	400.000.00	3 paket	450.000.00	13 paket	1.150.000.00	SEKRETARIAT	Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
	pemerintahan daerah																		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	18	1	1.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	11 paket	3 paket	400.000	3 paket	450.000	3 paket	500.000	20 paket	1.350.000	SEKRETARIAT	Kendari
Mewujudkan Tata kelola pemerintah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PENYELENGGAR	83,56 POIN	84,50 POIN	710.000	85,00 POIN	120.000	85,50 POIN	120.000	85,50 POIN	950.000	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN	Dalam dan luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
an yang baik								AAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN										PELAPORAN LAYANAN		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi perizinan dan nonperizinan yang disusun	11 dokumen	21 dokumen	625.000.000	21 dokumen	35.000.000	21 dokumen	35.000.000	3882 dokumen	695.000.000	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Dalam dan luar daerah	
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4	1.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis	3668 orang		50.000.000	50 orang	5.000.000	50 orang	5.000.000	3818 orang	15.000.000	BIDANG PENYELENGGA RAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)						
							Risiko Terintegrasi secara Elektronik	risiko terintegrasi secara elektronik														
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4	1.01	7	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah	51 kegiatan usaha	1 kegiatan usaha	600.000.000	1 kegiatan usaha	10.000.000	1 kegiatan usaha	10.000.000	54 kegiatan usaha	620.000.000	BIDANG PENYDAN NONPERIZINAN ELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	Dalam dan luar daerah			
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan	4 orang	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	10 orang	60.000.000	BIDANG PENYDAN NONPERIZINAN ELENGGARAAN	Dalam dan luar daerah			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
							Fasilitas/Insentif Daerah	Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota									PELAYANAN PERIZINAN		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin kewenangan daerah provinsi yang diterbitkan	3666 izin	500 izin	85.000.000	500 izin	85.000.000	500 izin	85.000.000	5259 izin	255.000.000	SEKRETARIAT	Dalam dan luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)						
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4	1.02	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	3666 orang	500 orang	60.000.000	500 orang	60.000.000	500 orang	60.000.000	5166 orang	180.000.000	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Dalam dan luar daerah		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4	1.02	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	3666 orang	500 orang	60.000.000	500 orang	60.000.000	500 orang	60.000.000	5166 orang	180.000.000	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN	Dalam dan luar daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
							Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi										PELAPORAN LAYANAN		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	4	1.02	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	2 kegiatan usaha	2 kegiatan usaha 20.000.000	2 kegiatan usaha 20.000.000	2 kegiatan usaha 20.000.000	2 kegiatan usaha 20.000.000	2 kegiatan usaha 20.000.000	2 kegiatan usaha 60.000.000	2 kegiatan usaha	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Dalam dan luar daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja	Lokasi
										Kerangka Pendanaan						Kinerja pada			
										2024		2025		2026		Akhir Periode			
Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab												
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Lama rata-rata proses penerbitan izin pasca berkas lengkap	7 hari	3 hari	50.000.000	2 hari	70.000.000	1 hari	80.000.000	1 hari	200.000.000	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah	
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	6	1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat daerah provinsi	3 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.000.000	6 dokumen	200.000.000	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	18	6	1.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dimanfaatkan	3666 dokumen	500 dokumen	50.000.000	600 dokumen	70.000.000	700 dokumen	80.000.000	546.000.000	200.000.000	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	Dalam dan luar daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa Perangkat Daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU Perangkat Daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Daerah.

IKU Daerah maupun IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran strategik RPD, sementara indikator kinerja hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program prioritas. Pemilahan kinerja mulai dari IKU Daerah, IKU Perangkat Daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 tertuang dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026

Tujuan	SASARAN	IKU	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Tahun			Kondisi Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
Mewujudkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN yang berkualitas	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 20,19 T	Rp. 21,73 T	Rp. 22,5 T	Rp. 23 T	Rp. 23 T
Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP DPMPSTSP	BB	BB	BB	A	A
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP	Nilai pelayanan publik PTSP	A (-)	A (-)	A (-)	A	A

7.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain memiliki Indikator Kinerja Utama, DPMPSTSP Prov. Sultra juga mempunyai Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. IKK sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IKK DPMPSTSP Prov. Sultra terdiri atas 1 IKK Hasil (*outcome*) yaitu persentasi peningkatan investasi di Provinsi Sultra dan 11 IKK Keluaran (Output). IKU DPMPSTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 tersaji pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci DPMPSTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026

No.	IKK	Meta Indikator	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun			Kondisi Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	4 fasilitas insentif	4 fasilitas insentif	4 fasilitas insentif	4 fasilitas insentif	4 fasilitas insentif
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)	Tidak Tersedia karena belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Belum ada	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Kegiatan Forum Investasi	1 Kegiatan seminar bisnis/ Forum/ one on one meeting	1 Kegiatan seminar bisnis/ Forum/ one on one meeting	1 Kegiatan seminar bisnis/ Forum/ one on one meeting	4 Kegiatan seminar bisnis/ Forum/ one on one meeting
5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan pameran penanaman modal yang diikuti/ dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan yaitu: 1. HPN Pameran. Investasi 2022 2. Pameran Umkm 3. Pameran GTRA 2022 4. Pameran Hut Sultra 58 5. Pameran Kolut. 6. Sultra Properti Expo	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	12 kegiatan
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Terlaksananya 1 kegiatan penerimaan misi penanaman modal yaitu dari Negara Slovakia	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah perusahaan/ perorangan yang berkonsultasi mengenai perizinan dan non perizinan penanaman modal	310 Pelayanan Konsultasi Perizinan Penanaman Modal	300 perusahaan/ perorangan	300 perusahaan/ perorangan	300 perusahaan/ perorangan	1510 perusahaan/ perorangan
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3408 Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra	500 izin	500 izin	500 izin	4908 izin
9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi	Rp. 20,19 T	Rp. 21,73 T	Rp. 22,5 T	Rp. 23 T	Rp. 23 T
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/ kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	53 ASN	55 ASN	55 ASN	55 ASN	55 ASN
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal PMA dan PMDN	42 Perusahaan	45 Perusahaan	45 Perusahaan	45 Perusahaan	177 perusahaan
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	17 Dokumen Dari 17 Kabupaten/ Kota	17 Dokumen Dari 17 Kabupaten/ Kota	17 Dokumen Dari 17 Kabupaten/ Kota	17 Dokumen Dari 17 Kabupaten/ Kota	68 Dokumen Dari 17 Kabupaten/ Kota
13	Peningkatan Investasi Sultra	Persentasi Peningkatan Investasi Sultra	Menurun 27,71% dibandingkan tahun 2021	Meningkat 7,55%	Meningkat 3,42%	Meningkat 2,17%	Meningkat 14,48% dibandingkan periode awal RPJMD

VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

DPMPTSP Prov. Sultra berkomitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Prov. Sultra Tahun 2024-2026. Dalam Renstra 2024-2026 ini DPMPTSP Prov. Sultra mendukung pencapaian dua tujuan dan tiga sasaran RPD masing-masing:

- a. Tujuan 3 (tiga) dan sasaran 8 (delapan)
- b. Tujuan 4 (empat) sasaran 12 (duabelas) dan sasaran 13 (tigabelas)

Tujuan 3 adalah Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan. Sasaran 8 yaitu meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Tujuan 4 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Saran 12 yaitu meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Sasaran 13 adalah meningkatnya kualitas layanan publik.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan perangkat daerah yang menjadi panduan bagi Pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pembangunan di masa transisi.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra akan menjadi dasar dalam hal penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja DPMPTSP Prov. Sultra yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DPMPTSP Prov. Sultra untuk tahun selanjutnya.

Dokumen Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah harus diwujudkan selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun kedepan dengan memperhatikan kemampuan finansial perangkat daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah yaitu antara lain: Pemilu dan pilkada serentak yang dilaksanakan pada Tahun 2024 diharapkan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana kita ketahui masa transisi bagi pemerintah daerah menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024, tetap memerlukan perencanaan pembangunan menengah daerah.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 menjadi dokumen daerah yang perlu diketahui dan dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder* DPMPTSP) dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah perangkat daerah.

8.2. Saran

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2024-2026 ini diharapkan terlaksana secara terarah, terukur dan terkendali sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan berkelanjutan. Seluruh pegawai DPMPTSP Prov. Sultra harus bertanggungjawab dalam menjaga konsistensi antara Renstra dengan implementasi tahunannya, sehingga Renstra DPMPTSP Prov. Sultra yang telah ditetapkan dapat menjadi bagian dari proses mewujudkan Sulawesi Tenggara sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing.

Kendari, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINRINGI, SE., M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

Nip. 19771014 200312 1 007